

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini berusaha mengungkap pandangan sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah dan guru terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat. Setelah dipaparkan hasil penelitian dan pembahasannya pada bab sebelumnya maka pada bab ini akan disimpulkan hasil penelitian ini secara garis besar. Kesimpulan merupakan pernyataan yang mengandung makna sebagai hasil inti penelitian ini. Selain itu pada bab ini akan dipaparkan rekomendasi untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah dan guru di Kabupaten Bangka Barat memiliki pandangan positif terhadap konsep pendidikan inklusif namun dalam penyelenggaraannya mereka berpandangan bahwa anak berkebutuhan khusus lebih baik diberikan kelas khusus dengan guru khusus.
2. Kepala sekolah dan guru belum memiliki pandangan yang tepat terhadap konsep anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dipahami sebagai anak yang memiliki kelainan fisik atau memiliki daya pikir yang lemah atau kombinasi dari keduanya.
3. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat belum terlaksana dengan cukup baik.
 - a. Pada dimensi budaya, terdapat interaksi yang baik antara anak berkebutuhan khusus dengan guru dan anak reguler. Tidak terjadi bully pada saat ini kepada anak berkebutuhan khusus. Selain itu guru saling bertukar pikiran untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam proses pembelajaran.
 - b. Pada dimensi kebijakan, sekolah belum membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti penyediaan sarana prasarana, penerbitan tata tertib yang melarang *bully*, pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai acuan pelaksanaan dan pelatihan guru.
 - c. Pada dimensi praktik, sekolah belum melakukan penyesuaian sistim pendidikan dan persekolahan bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka masih dipaksakan untuk mengikuti sistim reguler sehingga proses belajar menjadi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah melakukan identifikasi terhadap hambatan belajar anak namun tidak dilanjutkan dengan melakukan asesmen dan membuat perencanaan pembelajaran individual.
4. Tantangan penyelenggaran pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat terdiri dari tantangan konseptual dan tantangan implementasi.
 - a. Tantangan Konseptual

- Bagaimana membentuk pemahaman yang tepat tentang konsep anak berkebutuhan khusus
- b. Tantangan Implementasi
- Bagaimana membangun pemahaman yang tepat tentang penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler
 - Bagaimana membangun kerjasama dengan orang tua.
 - Bagaimana melaksanakan pembelajaran kolabratif denan bekerja sama dengan guru khusus atau menyediakan guru pendamping khusus.
 - Bagaimana menyiapkan sekolah untuk dapat menerima semua ABK
 - Bagaimana mendorong sekolah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung penyelenggaran pendidikan inklusif.
 - Bagaimana mengelola sarana prasarana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
 - Bagaimana sekolah secara aktif melakukan pengembangan guru.
 - Bagaimana mempersiapkan guru untuk mengajar pada kelas inklusif.
5. Program yang dapat membantu sekolah mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu sosialisasi, pelatihan guru dan studi banding.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Untuk sekolah
1. Agar melakukan analisis sumber-sumber informasi dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti dinas pendidikan, sekolah luar biasa, guru pendidikan khusus, dosen pendidikan khusus atau sumber lain dan menggunakannya secara efektif dan efisien.
 2. Agar mengambangkan pengetahuan stakeholder sekolah tentang konsep pendidikan inklusif, konsep anak berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dengan secara aktif menyelenggarakan program sosialisasi, pelatihan guru dan studi banding dengan tujuan khusus :
 - a. Menggali pengetahuan tentang penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.
 - b. Menggali pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus.
 - c. Membangun kerjasama antara guru kelas dengan orang tua untuk mendukung belajar anak.
 - d. Membangun kerjasama dengan lembaga lain yang terkait dengan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti dengan sekolah luar biasa.
 - e. Membangun pengetahuan dan pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus.

- f. Menggali pengetahuan tentang regulasi pemerintah terkait pendidikan inklusif sebagai dasar pembuatan kebijakan sekolah.
 - g. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.
 - h. Mengalokasikan anggaran operasional untuk pengembangan guru.
 - i. Meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar pada kelas inklusif.
- b. Dinas Pendidikan
1. Agar menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan guru untuk membangun pengetahuan tentang penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, konsep anak berkebutuhan khusus, terbangunnya kerjasama antara guru dengan orang tua, menyiapkan sekolah untuk menerima semua anak berkebutuhan khusus, mendorong sekolah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, mengelola sarana dan prasarana sekolah, pengembangan guru dan mempersiapkan guru untuk mengajar pada kelas inklusif.
 2. Agar menyelenggarakan program studi banding untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ke sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan baik.
 3. Agar menyelenggarakan *pilot project* sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
 4. Agar menyediakan anggaran guna memfasilitasi sekolah untuk mengembangkan guru, melakukan penataan sarana prasarana sekolah dan melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pendidikan inklusif.
 5. Agar memberikan pendampingan, pengawasan dan perlindungan kepada sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 6. Agar menyusun pedoman atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat